

# **PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**



***RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2017 – 2019***

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LANGKAT**

# **BAB - I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

#### **a. Definisi**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan sebuah dokumen perencanaan Pembangunan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 5 (Lima) tahun kedepan yang mana penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, maka dengan demikian Program dan Kegiatan SKPD sebagai unsur Organisasi Kabupaten secara keseluruhan, diharapkan dapat mendukung program – program Kepala Daerah.

Selain itu Renstra juga merupakan suatu proses perencanaan, dan sebagai suatu proses, perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa yang akan datang dan bagaimana upaya pencapaiannya. Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja SKPD yang merupakan instrumen pertanggungjawaban pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 adalah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Kabupaten dibidang Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2016, tentang Rincian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat. Berdasarkan yang diuraikan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2019 yang mampu memberikan gambaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, indikator kinerja, program, kegiatan dan pagu indikatif serta menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat tahun 2017 -2019 merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang disusun setiap tahun.

#### **b. Amanat Regulasi tentang perlunya penyusunan Renstra SKPD**

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Dan sebagaimana yang ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Tahun 2008 (PP Nomor 8/2008) bahwa setiap SKPD diarahkan (diharuskan) untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tercantum pada Bab IV, Pasal 25). Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis.

#### **c. Nilai Strategis Renstra SKPD**

Keberadaan Renstra SKPD akan sangat membantu Kepala Daerah dalam menjabarkan visi, misi, dan program-program pembangunan yang telah dikampanyekan pada saat Pilkada yang lalu dan telah dimuat didalam RPJM Daerah. Dokumen Renstra SKPD juga akan memudahkan Kepala Daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja program dan proyek/kegiatan, serta mengetahui sejauhmana penanganan dan penanggulangan terhadap berbagai masalah dan kondisi kekinian yang ada di tengah-tengah masyarakat selama ke pemerintahannya telah dilakukan oleh SKPD yang diberikan tugas pelayanan untuk itu.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu membuat suatu perencanaan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh SKPD untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut. Pada akhirnya keputusan tersebut harus dapat dievaluasi dan diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajarannya untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan ke P U an.

## **2. Landasan Hukum**

a. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten yang mengacu kepada :

- Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD) sebagai rencana tahunan,
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah,
- Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung,
- Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi,
- Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air,
- Undang undang Nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten – kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Utara,

- Undang undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982 tentang perpindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamasya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Langkat,
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor       Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2017 – 2019.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Langkat.

### **3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra SKPD**

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan dalam prinsip – prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
- b. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :
  - Merumuskan gambaran kondisi pelayanan yang dilaksanakan untuk diberikan kepada masyarakat, yang menyangkut pembangunan dan pengembangan sarana maupun fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan Infrastruktur di Kabupaten Langkat untuk 5 (Lima) Tahun kedepan.
  - Merumuskan gambaran ketersediaan Anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan Kegiatan selama 5 (Lima) tahun kedepan.
  - Untuk menerjemahkan Visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah selama 5 (Lima) tahun sesuai dengan Tupoksi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode Tahun berkenaan,
  - Untuk menetapkan berbagai Program dan Kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

#### **4. Sistematika penulisan**

- Bab I** : Pendahuluan yang mencakup Latar belakang, Landasan Hukum dan maksud /tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II** : Gambaran Pelayanan SKPD yang mencakup tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
- Bab III** : Isu isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi, Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis, serta penentuan isu isu strategis.
- Bab IV** : Visi, misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup Visi dan misi SKPD, Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD , strategi dan kebijakan.
- Bab V** : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI** : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VII** : Penutup.

## **BAB – II**

# **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

### **1. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan yang diserahkan oleh Kepala Daerah dan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

Untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- b. Merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan sistem dibidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang.
- c. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- e. Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

### **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat pada Bab II struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II) Golongan IV/a sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 973/SP/BKD/2016, Tanggal 16 Nopember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural Eselon II.b dan III.a dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang
- f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 31 Desember 2016 sebanyak 135 orang dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
<b>1</b>	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2016</b>	
<b>2</b>	<b>Mutasi selama tahun 2016 :</b>	
	Pensiun	<b>4</b>
	Mutasi ( masuk )	<b>4</b>
	Mutasi keluar	<b>26</b>
	Meninggal	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Jumlah SDM per 31 Desember 2016</b>	<b>135</b>

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

#### 1) Berdasarkan Jenjang Jabatan(Peran)

No	Uraian	Jumlah (Orang)
<b>1</b>	<b>Pejabat Struktural</b>	
	- Eselon II : Kepala Dinas	
	- Eselon III : Sekretaris Kepala Bidang Bina Marga Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Bidang Pengairan	<b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>
	- Eselon IV : Kasubbag Umum, Perencanaan dan Informasi Publik Kasubbag Tata Usaha Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga Kasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Kasi Peralatan Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya Kasi Pelaksanaan Bangunan Gedung Cipta Karya Kasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penataan Ruang Kasi Perencanaan Sumber Daya Air Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air KUPTD Kecamatan	<b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>23</b>
<b>2</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>	<b>Nihil</b>
<b>3</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>38 orang</b>

**2) Berdasarkan strata pendidikan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	S-3	<b>Nihil</b>
2	S-2	<b>2</b>
3	S-1	<b>44</b>
4	Diploma III	<b>4</b>
5	SLTA	<b>58</b>
6	SLTP	<b>17</b>
7	SD	<b>10</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>135 orang</b>

**3) Berdasarkan Golongan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	Golongan IV - Kepala Dinas - Kabid - Staf	<b>1</b> <b>2</b>
2	Golongan III - Sekretaris - Kabid - Kasubbag - Kasi Bidang - KUPTD - Staf	<b>1</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>9</b> <b>19</b> <b>31</b>
3	Golongan II - Staf	<b>59</b>
4	Golongan I	<b>9</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>

## 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

### 4.1. Tanah

Tanah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah seluas 30.084,50 M2 yang merupakan tanah persil yang terletak di Jl.T.Amir Hamzah No.3 Stabat.

### 4.2. Bangunan Kantor

Bangunan gedung kantor seluas 4.736 M2 terdiri atas :

- Bangunan kantor	:	920,50	M2
- Bangunan Laboratorium	:	96	M2
- Bangunan KM/WC	:	12	M2
- Bangunan garasi alat berat	:	1.224	M2
- Bangunan bengkel	:	705	M2
- Bangunan Musholla	:	81	M2
- Bangunan gedung parkir	:	128	M2
- Bangunan Aula	:	240	M2
- Bangunan Pos jaga	:	34,50	M2
- Bangunan gedung arsip	:	25	M2
- Bangunan gudang	:	640	M2
- Bangunan Workshop	:	630	M2
- Bangunan Taman	:	9	Lokasi

### 4.3. Peralatan & Mesin

Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat didukung dengan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Alat – alat besar seperti Motor Grader, Buldozer,Exavator,Whel Loader,dll.
- Alat – alat angkutan seperti Mini Bus, Pick up Sepeda motor dll.
- Alat – alat bengkel.
- Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga seperti Komputer, Note book, Mesin tik, Printer, Lemari, Meja kerja, Kursi dll.
- Alat – alat studio berupa Kamera, GPS, proyektor ,Teodolite, Alat ukur dll
- Alat – alat Laboratorium berupa Pelobang aspal, CBR, Sand cone test, Mesin core drill, Extraksi dll.
- Penarangan Lampu Jalan saat ini mencapai 24 ribu unit yang tersebar di Kabupaten Langkat.

## 5. Kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan SKPD

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber jaringan, sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Langkat telah menjadi prioritas utama Pemerintah, mengingat bahwa sarana dan prasarana fisik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling krusial dan menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi Pemerintah sendiri alokasi dana dan sumber dana lainnya yang diperuntukkan bagi perkembangan sarana dan prasarana fisik semakin mendapat perhatian dan memperlihatkan peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik baik bangunan, jaringan jalan/jembatan dan pengairan merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Langkat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan dan penyempurnaan kinerja saat ini mengoptimalkan fungsi – fungsi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat stimulan dan berkelanjutan. Pada akhir tahun 2016 (awal Tahun 2017) kondisi Sarana jalan dan Pengairan dapat dilihat sebagai berikut :

- Jumlah luasan sawah beririgasi 2.759 Ha.
- Prosen luas irigasi dalam keadaan baik 42,46 %  
Berdasarkan Data terakhir dari Bidang Pengairan, bahwa Jumlah luasan sawah beririgasi adalah seluas 5.182 Ha, dan diharapkan untuk tahun berikutnya bertambah luas dengan adanya proyek Pembangunan bendung sei lepan di kec.Sei lepan.
- Prosentase panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik 65,75 %
- Panjang jalan desa yang tertangani 154,26 Km.

Dan berdasarkan hasil Penyusunan Data base Jalan dan Jembatan Tahun 2016 Panjang jaringan Jalan yang ada di Kabupaten Langkat adalah sepanjang 1.412,84 Km dan Jembatan sebanyak 84 Buah yang terdiri atas :

NO	Type Permukaan	Satuan	Panjang jalan
1	Jalan Aspal	Km	809.83
2	Jalan Kerikil	Km	595.81
3	Jalan batu	Km	119,20
3	Jalan Tanah	Km	88.30
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,412.84</b>

NO	Jembatan	Satuan	Jumlah
1	Jembatan	Bh	83
2	Jembatan sementara	Bh	1
	<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>

Dari data panjang jalan diatas dapat diuraikan dengan kondisi sebagai berikut :

NO	Kondisi Permukaan jalan	Satuan	Panjang
1	Baik	Km	245,83
2	Sedang	Km	319,30
3	Rusak	Km	807,30
3	Rusak berat	Km	40,41
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,412.84</b>

NO	Kondisi Jembatan	Satuan	Panjang
1	Baik	M	798
2	Sedang	M	498
3	Rusak	M	422
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,718</b>

Hasil penyusunan Data base Pengairan maka dapat diuraikan Data – data berupa

1. Sungai : sepanjang : 903 Km,
2. Saluran Daerah irigasi : seluas : 4.728 Ha

Dengan memandang dari tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berupaya meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang merata, dan melakukan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pembangunan demi pelayanan kepada masyarakat dibidang infrastruktur.

Dalam usaha untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas demi pelayanan kepada masyarakat tersebut terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang diantaranya adalah :

- Alokasi Dana pembangunan yang ada masih belum memadai untuk melaksanakan pembangunan secara tuntas dan cepat.

- Penanganan jalan Kabupaten belum mendapatkan prioritas, sehingga jalan Kabupaten dalam Kondisi baik masih kurang dari memadai.
- Alokasi anggaran pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan program, tapi masih berorientasi pada pemerataan Kecamatan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat aset – aset pembangunan prasarana fisik seperti jalan/jembatan dan Pengairan.

Atas kendala – kendala yang dihadapi, maka Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang berupaya meningkatkan/mengupayakan alokasi dana untuk prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat menyentuh kepentingan rakyat dengan perencanaan yang jelas dan terarah.

## **BAB – III**

# **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD**

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari pembangunan jaringan jalan, jembatan dan saluran, baik pengembangan sistem jaringan maupun pemeliharaan/perawatan. Ketiga komponen dalam bidang ini merupakan prasarana dasar pengembangan kawasan dibidang ke Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Permasalahan prasarana jalan, jembatan serta jaringan dan Irigasi di Kabupaten Langkat saat ini di antaranya adalah :

- (1) Berat kendaraan pengangkut barang cukup tinggi, sehingga jalan menjadi rusak maka untuk keamanan lalu lintas jalan perlu diperlebar.
- (2) Banyak sarana air bersih (sumur bor) tidak terawat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawatnya dengan baik sehingga mengakibatkan bangunan sumur bor banyak yang tidak berfungsi lagi. Dalam hal masalah ini perlu kiranya dibentuk Lembaga swadaya masyarakat oleh Desa untuk menjaga kesinambungan fungsi dari pembangunan sumur bor tersebut.
- (3) Adanya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan bendung di Kec. Sei lepan termasuk jaringan/trase saluran irigasi primer dan saluran skunder menuju ke areal persawahan potensial. sehingga diharapkan Tim pembebasan lahan dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat dapat segera merealisasikan pembebasan lahan dimaksud.
- (4) Kondisi jaringan jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan penanganan dan perawatannya. peningkatan jaringan jalan dan jembatan telah dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran.
- (5) Pembangunan jalan relatif masih terbatas, disebabkan alokasi anggaran yang tersedia masih rendah.
- (6) Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan. Kerusakan jalan sering disebabkan aktivitas-aktivitas masyarakat yang melakukan pengangkutan material bahan bangunan seperti Galian “C” yang melebihi kapasitas daya dukung konstruksi jalan, timbunan bahan bangunan di badan atau di pinggir jalan yang menyebabkan terhalangnya aliran air ke drainase saat hujan, dan lain-lain.

- (7) Terdapat permasalahan prasarana jaringan drainase sehingga terjadi banjir ataupun genangan air.
- (8) Keterbatasan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Langkat dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase.

## **2. Penentuan isu isu strategis**

Dengan semakin meningkatnya kemajuan pembangunan dan juga pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bidang pangan dan sandang yang harus disiapkan guna memenuhi ketersediaan/kebutuhan masyarakat Langkat. Dari segi kelistrikan telah didirikan pembangunan PLTU di Kecamatan Pangkalan Susu, juga rencana Pembangunan Pabrik semen oleh PT. Indo Semen di Kecamatan Kutambaru Wilayah Langkat Hulu.

Untuk mendukung kegiatan seperti tersebut diatas perlu didukung dengan peningkatan Infrastruktur jalan baik jalan pedesaan maupun jalan Kabupaten yang berada di wilayah Langkat Hulu dan Teluk Aru.

Dibidang Pertanian Kabupaten Langkat, program Ketahanan Pangan harus ditingkatkan untuk ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Upaya mendukung program Ketahanan pangan dimaksud telah diupayakan langkah – langkah antara lain :

- 2.1** Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi agar pelayanan penyediaan air untuk petani optimal dapat tercukupi.
- 2.2** Kegiatan Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi.
- 2.3** Kegiatan pembangunan Daerah irigasi baru, guna extensifikasi areal persawahan irigasi teknis dengan meningkatkan indeks Pertanian (IP) minimal 2 x setahun.
- 2.4** Adapun rencana areal Irigasi baru adalah :
  - Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Sei lepan.
  - Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Sei Batang Serangan.
  - Pembangunan Jaringan Irigasi Sidorejo, Paya Salit, Gunung tinggi dan Sido Mukti Kec.Serapit.

## **3. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis**

Faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan potensi sumber daya organisasi) dan eksternal organisasi (peluang dan ancaman yang dimiliki organisasi agar tetap bertahan dan eksis).

Analisis lingkungan internal mencakup analisis terhadap kekuatan dan kelemahan potensi sumber daya yang dimiliki organisasi, yang terdiri dari SDM, finansial, informasi, fasilitas perlengkapan dan sistem manajemen.

- SDM, ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan volume kerja yang ada relatif sudah memadai. Namun ditinjau dari aspek skill dan pengetahuan SDM di bidang teknik sipil relatif masih rendah.
- Finansial, dilihat dari rasio alokasi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase dengan laju pertumbuhan kebutuhan
- Fasilitas perlengkapan, ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan pendukung aktivitas organisasi relatif memadai.

Analisis lingkungan eksternal diarahkan untuk melihat peluang dan ancaman yang muncul dari luar lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi eksistensi Sosial, semakin besarnya tuntutan *good governance* serta semakin kritisnya masyarakat akan pelayanan prima dari aparat juga perlu menjadi perhatian. Meningkatnya permasalahan sosial sebagai dampak permasalahan banjir, mendorong masyarakat semakin kritis dan mendorong timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase sedangkan kemampuan anggaran pembangunan masih terbatas. Disamping itu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan badan jalan dan jaringan drainase seperti mendirikan bangunan di atas badan jalan dari di atas.

#### **4. Analisa Isu Strategis**

Kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan jaringan jalan dan jembatan dan irigasi antara lain adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik jalan dan jembatan dan irigasi. Kemudian terselenggaranya inventarisasi jalan dan jembatan seperti yang diharapkan. Selanjutnya kualitas dan kuantitas prasarana fisik jalan dan jembatan juga meningkat seiring dengan upaya meningkatkan potensi pembiayaan. Dan akhirnya juga diharapkan meningkatnya peran serta masyarakat serta kerjasama dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta dalam proses pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta irigasi.

Sementara itu kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan tersebut antara lain adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Kemudian kualitas dan kuantitas data base dan perencanaan sistem jaringan jalan, jembatan, saluran drainase dan irigasi juga meningkat. Selanjutnya meningkatnya keterpaduan dan kerjasama pembiayaan pembangunan dimaksud juga kembali diharapkan meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan, jembatan, Irigasi dan saluran drainase.

# BAB – IV

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1.1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara Umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial untuk terwujud. Visi ditetapkan sebagai gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen murni seluruh masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat. Tujuan penetapan Visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang menjadi perekat dan menyatukan gagasan yang strategis, melalui orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan mampu menjamin keseimbangan organisasi.

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang telah dirumuskan dan ditetapkan adalah :

**” Terwujudnya Infrastruktur yang memadai,  
terpadu dan berwawasan lingkungan ”**

Adapun makna kata – kata yang terdapat pada visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Memadai yaitu :

- Bila pembangunan infrastruktur dapat menyentuh dan memenuhi akan kebutuhan masyarakat.
- Bila pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tepat sasaran yaitu dapat memajukan perekonomian rakyat.

#### b. Terpadu yaitu :

- Terpadu antara kebutuhan masyarakat atas infrastruktur jalan desa, jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi sehingga dapat melancarkan arus transportasi dan perekonomian rakyat.

#### c. Berwawasan lingkungan

- Pembangunan prasarana selalu berorientasi pada objek/situasi lingkungan sekitarnya.
- Masyarakat dapat menjaga hasil – hasil pembangunan infrastruktur dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam gerak kehidupan sehingga tercipta suatu hubungan timbal balik yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia, alam dan lingkungannya.

## 1.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dirumuskan adalah :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional.
- b. Mewujudkan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat banyak.
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terpadu dan selaras.

## 2. Tujuan dan Sasaran

### 2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan.

Dalam pencapaian visi dan misi, maka Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

- a. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dibidang tugasnya.
- b. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dengan perencanaan yang jelas dan terarah.

**Tabel. 4.1**  
**Misi – Tujuan**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia, Aparatur yang Profesional.	1. Meningkatkan kompetensi Sdm Aparatur dibidang tugasnya.
2. Mewujudkan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat banyak.	1. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terpadu dan selaras.	1. Meningkatkan kualitas pembangunan indrastruktur dengan perencanaan yang jelas dan terarah.

### 2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan Sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional.
- b. Terlaksananya pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- c. Terlaksananya pembangunan yang terpadu dan selaras.

**Tabel. 4. 2**  
**Tujuan – Sasaran**

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator
<b><u>Misi Pertama</u></b>		
1. Menyusun serta meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang baik dan berkualitas	1. Terlaksananya koordinasi, harmonisasi dan terwujudnya sinergi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1. Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif - RPJPD - RPJMD - Renstra SKPD - RKPD - Renja SKPD - RTRW/RUTR /RDTR
		2. Tersedianya dokumen : - Lakip Bupati dan Bappeda - LKPJ Bupati - Dokumen laporan DAK, TP, Evaluasi Hasil RKPD dll.
<b><u>Misi Kedua</u></b>		
1. Meningkatkan dan memperkuat kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan	1. Tersedianya data/statistik dan informasi produk-produk perencanaan pembangunan yang akurat	1. Tersedianya data/statistik dan informasi pembangunan yang selalu di update secara rutin.
<b><u>Misi Ketiga</u></b>		
1. Meningkatkan kapasitas SDM perencana dan fasilitas pendukungnya	1. Terciptanya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Formal/Non Formal bidang perencanaan.
	2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencana pembangunan	1. Tersediannya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
2. Meningkatkan pelayanan prima	1. Terciptanya pelayan yang baik dalam bidang perencanaan	1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan berkualitas

### **3. Strategi dan Kebijakan**

#### **3.1 Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya aparatur dengan mengikuti pelatihan – pelatihan dibidang tugasnya.
- b. Bila memungkinkan , Aparatur dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Melaksanakan perencanaan pembangunan yang lebih jelas dan terarah.

#### **3.2 Kebijakan**

Demi mewujudkan tujuan diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengambil kebijakan sebagai berikut :

- a. Melakukan perkembangan wilayah perkotaan sebagai daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang sesuai, sehingga mampu berkembang sesuai dengan layaknya kehidupan kota.
- b. Penataan dan pembentukan wilayah kota Kecamatan dan Kelurahan serta desa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi sehingga dengan ditatanya satu wilayah pertumbuhan akan mampu mendorong segala sector pembangunan di perkotaan.

Kebijakan umum pembangunan diarahkan kepada pembangunan, peningkatan dan perawatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan perawatan/pemeliharaan perumahan/pemukiman serta peningkatan dan perawatan/pemeliharaan pengairan dan pengembangan perkotaan.

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan masyarakat dengan melibatkan aparat, menggali potensi daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Langkat.

Kebijakan yang akan ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam rangka mempercepat proses mewujudkan visi dan misinya maka dilakukan sebagai berikut :

- Memberi kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti pelaksanaan Bintek ataupun Diklat atau mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Mengupayakan alokasi dana untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.
- Memberikan pembinaan kepada setiap unsur pelaksana kegiatan baik internal instansi maupun pelaksana kegiatan dilapangan.

## BAB – V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- A. Program Kerja merupakan strategi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi nasional dan global. Program Kerja Strategi tidak terlepas dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategis hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang dan mungkin dapat berubah – ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Program Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebagai kewenangannya yang berkesinambungan ditetapkan meliputi :

- a. Program Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan/pemukiman serta Gedung Pemerintah.
- b. Program Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan.
- c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran.

Program tersebut didukung dengan berbagai kegiatan (aktivitas) yang merupakan penjabaran dari program kerja yang strategis yang telah dirumuskan oleh organisasi tersebut.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program diatas, maka ditetapkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran**

Program ini diperuntukkan bagi kelancaran administrasi Kantor, dimana Tahun 2016 dianggarkan biaya sebesar Rp. 1.838.900.000,-

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini didukung dengan kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 14 Paket, Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor, Pemeliharaan Rutin Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebanyak 9 Paket serta perencanaan Pembangunan dan pemeliharaan pada P.APBD Tahun 2016 tertampung Anggaran pada Program ini sebesar Rp. 8.089.526.000,-

**3. Program peningkatan Disiplin aparatur**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin aparatur pegawai dimana Tahun 2016 dianggarkan dana sebesar Rp. 65.000.000,- untuk pembelian Pakaian Khusus hari – hari tertentu.

**4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dimana pada tahun 2016, dianggarkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan akan dilatih tenaga tekhnis sebanyak 24 Orang .

**5. Program Pembangunan jalan dan Jembatan**

Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan dan jembatan, dimana Pada P.APBD Tahun 2016 Program ini dilaksanakan sebanyak 257 Paket dengan Anggaran Biaya sebesar Rp. 399.628.450.750,-

**6. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Program ini meliputi kegiatan : Pembebasan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Proyek di Kab. Langkat pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000.000,-.

**7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**

Program ini meliputi kegiatan : Pembangunan Bronjong/ tembok penahan untuk pengaman jalan ataupun sarana lainnya.Pada Tahun 2016 Program ini dianggarkan dengan sebesar Rp. 5.261.000.000,- sebanyak 10 Paket kegiatan.

**8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2016 Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 94.136.200.000,- sebanyak 46 Paket kegiatan.

**9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**

Program ini meliputi kegiatan : Belanja Modal Pengadaan Excavator 3 unit dan Pemeliharaan Alat – Alat Berat. Pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 5.300.000.000,-

**10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**

Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Pembangunan Pintu Air, Pelaksanaan Normalisasi saluran, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu air, Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi. Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 32.088.000.000,- sebanyak 64 paket kegiatan.

## **11. Program Pengendalian banjir**

Program ini meliputi kegiatan : Peninggian / pembangunan tanggul untuk mencegah bahaya banjir. Pada Tahun 2016 Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 2.010.000.000,-dengan 3 Paket kegiatan.

### **B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif**

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan pencapaian suatu kegiatan, sasaran atau tujuan Strategik atau bahkan Visi Organisasi. Penentuan Indikator kinerja dan kelompok sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dirinci pada setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan yang dituangkan pada Strategi Pembangunan Kabupaten Langkat yaitu :

- Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya air.
- Peningkatan panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
- Peningkatan Infrastruktur pemukiman.

Indikator sasaran pada Strategi diatas telah ditetapkan pada Peningkatan Sumber Daya air dan Jalan yang dirumuskan pada (**Lampiran 1**)

## **BAB – VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM**

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat dapat dibagi melalui Program dan Kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  - Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur dalam mendukung Tupoksi.
2. Program Pembangunan jalan dan Jembatan.
  - Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
3. Program pembangunann Saluran Drainage/Gorong – gorong.
  - Tersedianya saluran parit yang lancar.
4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
  - Tersedianya infrastruktur pengendali erosi tebing sungai yang cukup dan terpadu untuk pengendalian daya rusak air dan menjaga tanggul dalam kondisi baik dan mantap.
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - Tersedianya prasarana jalan dan jembatan dalam kondisi lebih baik dan terpelihara.
6. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
  - Tersedianya sarana alat berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
  - Tersedianya infrastruktur irigasi yang cukup untuk meningkatkan pelayanan air irigasi yang optimal bagi lahan pertanian.
8. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.
  - Tersedianya sarana air bersih yang cukup.
9. Program pengembangan, pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber daya air lainnya.
  - Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang cukup dan terpadu untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
10. Program Pengendalian banjir.
  - Tersedianya infrastruktur pengendali banjir yang cukup dan terpadu untuk pengendalian genangan dan daya rusak air.
11. Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan.
  - Tersedianya sarana MCK di pedesaan

Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat pada Lampiran Renstra Ini

## **BAB – VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat merupakan peran serta dalam menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang saat ini. Dirumuskannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berarti telah mengatur arah pengembangan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan melibatkan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Instansi terkait, masyarakat dan lembaga – lembaga swasta.

Dengan ditentukannya Visi dan misi sebagai tujuan idealis Renstra yang tergambar didalamnya, maka diharapkan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang akan dapat mencapai peningkatan hasil pembangunan yang dilakukan sebagaimana yang telah dirumuskan. Berhasilnya pembangunan Kabupaten Langkat sebagai subsistem pembangunan nasional menuntut peran aktif masyarakat, yang dilandasi oleh sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan serta disiplin para penyelenggara untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal, serta diperlukan adanya persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparaturnya pemerintah maupun swasta.

Dalam meningkatkan tanggung jawab bersama dan demi semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu ditumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam menyiapkan berbagai perangkat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai implementasi Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ***“terwujudnya Infrastruktur yang memadai, terpadu dan berwawasan lingkungan”*** Akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ini dapat tersusun, yang merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan Nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila yang akan menghantarkan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik selaras dan seimbang.

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kab. Langkat**



Nip.19620703-199203 1 009